

MONITOR BERITA

<input type="radio"/> BISNIS INDONESIA <input type="radio"/> KOMPAS <input type="radio"/> KORAN TEMPO <input type="radio"/> MEDIA INDONESIA <input type="radio"/> NERACA <input type="radio"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="radio"/> RAKYAT MERDEKA <input type="radio"/> REPUBLIKA <input type="radio"/> SUARA KARYA	<input type="radio"/> SUARA PEMBARUAN <input type="radio"/> SINAR HARAPAN <input type="radio"/> THE JAKARTA POST <input type="radio"/> MAJALAH GATRA <input type="radio"/> MAJALAH TEMPO <input type="radio"/> MAJALAH FORUM <input checked="" type="radio"/> INVESTOR IND. <input type="radio"/>																								
KODE : <input type="checkbox"/> LISTRIK <input type="checkbox"/> MIGAS	<input type="checkbox"/> GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL <input checked="" type="checkbox"/> UMUM																								
<table style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:10%;">JAN</td><td style="width:10%;">FEB</td><td style="width:10%; border: 1px solid black; border-radius: 50%;">MAR</td><td style="width:10%;">APR</td><td style="width:10%;">MEI</td><td style="width:10%;">JUN</td><td style="width:10%;">JUL</td><td style="width:10%;">AGST</td><td style="width:10%;">SEPT</td><td style="width:10%;">OKT</td><td style="width:10%;">NOV</td><td style="width:10%;">DES</td></tr> <tr> <td>1 2 3 4 5 6 7 8 9 10</td><td>11 12 13 14 15 16</td><td>17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	11 12 13 14 15 16	17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31									
JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES														
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	11 12 13 14 15 16	17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31																							
HALAMAN : 12																									
TAHUN 2004																									

Komisaris Belum Setujui *Samurai Bond* PGN

Jakarta, Investor

Usulan PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS) untuk penerbitan obligasi berdenominasi yen Jepang (*samurai bond*) senilai US\$ 80 juta masih perlu dikaji lebih dalam. Komisaris PGN, Soemarmo Soerono mengatakan, pihak komisaris belum menyetujui rencana tersebut.

"Itu kan baru wacana. Bagaimana pun harus kita pertimbangkan kalau memang ada potensi untuk menggaling dana murah," kata Soemarmo, pekan lalu, di Jakarta.

Menurutnya, pihak komisaris belum memberikan persetujuan terhadap penerbitan obligasi tersebut. Ia menegaskan, rencana tersebut masih perlu dieksplorasi lagi dan dibandingkan dengan alternatif-alternatif pembiayaan lainnya untuk melihat apakah rencana ini *feasible*.

Sementara itu, Deputy Menneq BUMN Bidang Pertambangan, In-

dustri Strategis, Energi, dan Telekomunikasi Roes Aryawijaya mengatakan, penerbitan obligasi itu harus dilakukan sesuai dengan kebutuhan perusahaan. "Mereka memilih itu pasti ada alasannya, direksi itu kita berikan keleluasaan untuk memilih. Pokoknya kalau mereka salah mengambil keputusan mereka akan dihukum," ujar Roes, pekan lalu, di Jakarta.

Ia mengatakan, penerbitan itu sah-sah saja dilakukan jika perhitungan direksi menunjukkan penerbitan itu lebih menguntungkan bagi perusahaan. "Kita selalu memberikan pandangan kepada direksi agar mereka melakukan yang terbaik," tambahnya.

Sebelumnya, diberitakan PGN akan menerbitkan obligasi dalam denominasi yen senilai US\$ 80 juta dengan kupon bunga sekitar 3,5%-4%. Penerbitan tersebut diperlukan untuk membiayai proyek pipanisasi gas dari Duri-Dumai-

Medan sepanjang 400 km. Obligasi tersebut dinilai menjadi alternatif pembiayaan yang cukup murah dibandingkan Eurobond yang sebelumnya telah diterbitkan perusahaan. Diperkirakan, obligasi ini akan dijamin oleh PT Bank Mandiri Tbk (BMRI). Upaya penerbitan ini masih memerlukan pengkajian, terutama mengenai dampak fluktuasi nilai tukar yen terhadap dolar Amerika Serikat. Sebab, untuk pembangunan pipa gas itu, perusahaan membutuhkan dana dalam mata uang dolar AS.

Penerbitan Samurai Bond ini akan dilakukan sesegera mungkin. PGN disebutkan telah melakukan pembicaraan dengan Mizuho Bank, Jepang. Diperkirakan, bank inilah yang akan menangani penerbitan obligasi itu.

Untuk kebutuhan proyek pipanisasi gas di Jawa dan Sumatera, PGN memerlukan dana senilai to-

tal US\$ 500 juta. Perusahaan telah dua kali melakukan penerbitan Eurobond senilai US\$ 150 juta pada September 2003 dan US\$ 125 juta pada Februari 2004. Sehingga, perusahaan masih harus mendapatkan dana sekitar US\$ 225 juta untuk menuntaskan proyek itu.

Sepanjang tahun 2003, PGN membukukan kenaikan laba usaha 2% menjadi Rp 832 miliar dibandingkan setahun sebelumnya. Sedangkan laba bersih yang berhasil dibukukan Rp 519,45 miliar.

Pendapatan usaha perseroan sepanjang tahun 2003 tercatat Rp 3,596 triliun atau meningkat 14,1% dibandingkan pendapatan tahun 2002. Dari total pendapatan tersebut, usaha distribusi menyumbang Rp 2,964 triliun dan pendapatan transportasi gas Rp 627,7 miliar. Kedua jenis pendapatan tersebut masing-masing meningkat 15% dan 12% dibandingkan pendapatan tahun 2002. ● **rie**

MONITOR BERITA

<input checked="" type="radio"/> BISNIS INDONESIA <input type="radio"/> KOMPAS <input type="radio"/> KORAN TEMPO <input type="radio"/> MEDIA INDONESIA <input type="radio"/> NERACA <input type="radio"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="radio"/> RAKYAT MERDEKA <input type="radio"/> REPUBLIKA <input type="radio"/> SUARA KARYA	<input type="radio"/> SUARA PEMBARUAN <input type="radio"/> SINAR HARAPAN <input type="radio"/> THE JAKARTA POST <input type="radio"/> MAJALAH GATRA <input type="radio"/> MAJALAH TEMPO <input type="radio"/> MAJALAH FORUM <input type="radio"/> INVESTOR IND. <input type="radio"/>
KODE : <input type="checkbox"/> LISTRIK <input type="checkbox"/> MIGAS	<input type="checkbox"/> GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL <input checked="" type="checkbox"/> UMUM
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 HALAMAN : TG	TAHUN 2004

Proyek Waduk Jatigede perlu Amdal baru

BANDUNG (Bisnis): Pemerintah memastikan tidak akan membangun Waduk Jatigede sebelum ada analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) baru menyusul telah habisnya masa berlaku amdal atas proyek itu.

Menteri Negara Lingkungan Hidup Nabeli Makarim mengungkapkan sudah menjadi aturan yang baku bahwa proyek pembangunan fisik tidak bisa dilakukan apabila amdalnya belum keluar.

Dalam kasus Jatigede, lanjutnya, amdal perlu dilakukan lagi karena hasil Amdal terakhir sudah kedaluarsa.

"Kita harus mengikuti aturan. Memang harus ada amdalnya dulu baru proyek ini diputuskan dibangun ada tidak. Masa berlaku amdal terakhir atas proyek itu kan 1992 dan belum dilakukan amdal lagi. Itu sudah kedaluarsa karena amdal dianggap kedaluarsa lima tahun setelah dilakukan, berarti harus dilakukan amdal lagi," ujarnya di Bandung, akhir pekan lalu.

Dia menyatakan Kemen-

terian Lingkungan Hidup (KLH) dan Kementerian Perumahan dan Prasarana Wilayah (Kimpraswil) telah sepakat akan membangun Waduk Jatigede apabila telah dilakukan Amdal atas proyek itu.

"Keputusan jadi tidaknya proyek ini dibangun tergantung hasil Amdal," kata Nabeli.

Syarat utama penyelenggaraan Amdal, lanjut Nabeli, adalah kesepakatan masyarakat sekitar proyek yang menyatakan mereka setuju dengan proyek tersebut.

Oleh karena itu, dia mengharapkan masyarakat tidak tinggal diam dan segera menyelesaikan pro dan kontra atas rencana pembangunan Waduk Jatigede ini.

"Ketentuan amdal harus dilakukan *public hearing*. Dalam kasus Jatigede, masyarakat yang tidak setuju bisa mengadu ke DPRD, sehingga bisa dilakukan *public hearing* dengan mediator dewan," katanya.

Kesepakatan masyarakat ini, paparnya, menjadi kunci dilaksanakan atau tidaknya suatu proyek pembangunan.

Dia memberikan contoh so-
detan Sungai Citanduy sam-
pai saat ini tidak bisa dilan-
jutkan karena masih banyak
masyarakat yang menentang
proyek ini.

Nabeli mengakui pemer-
intah tidak bisa menerbit-
kan kebijakan yang bisa me-
nyelesaikan seluruh masa-
lah terkait pembangunan
Waduk Jatigede.

"Tidak ada *policy* yang
menyeluruh dalam kasus
Jatigede ini. Semua aspek,
harus dilihat satu per satu
terutama amdal."

Dia mengakui di satu sisi
ada pihak yang diuntung-
kan dengan dibangunnya
Waduk Jatigede karena bisa
dipakai untuk pengairan la-
han pertanian di kawasan
Indramayu, Cirebon dan Su-
bang serta bisa menghasil-
kan listrik berdaya 175 me-
gawatt.

"Di sisi lain, masyarakat
sekitar keberatan karena
berkaitan dengan proses
pembebasan lahan selain
itu masih ada masalah
lingkungan yang menggan-
jal terwujudnya proyek Wa-
duk Jatigede ini," tambah-
nya. (k4)

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH FORUM
- INVESTOR IND.
-

KODE : LISTRIK
 MIGAS

GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 UMUM

JAN FEB **MAR** APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 **29** 30 31

HALAMAN : 4

TAHUN 2004

Tim Pengkajian Perbaikan Rel Bukit Asam Dibentuk

JAKARTA — Pemerintah membentuk tim kajian yang melibatkan tiga Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk mencari solusi terhambatnya pasokan batu bara PT Bukit Asam Tbk. untuk Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Suralaya di Jawa Barat.

Komisaris Utama Bukit Asam Jarman mengungkapkan, tim tersebut terdiri dari Bukit Asam, PT Kereta Api Indonesia, dan PT Indonesia Power, yang menjadi pemilik PLTU Suralaya. Menurut dia, tim ini nantinya akan bekerja selama sekitar dua bulan untuk merumuskan metode perbaikan maupun sumber pembiayaan rel sepanjang sekitar 400 kilometer.

Rel itu merupakan sarana transportasi pengangkutan batu bara Bukit Asam dari sumber penambangan di Tanjung Enim, Sumatera Selatan, menuju Tarahan, Lampung. "Tim itu akan bekerja guna mencari solusi terbaik," katanya kepada *Koran Tempo* akhir pekan lalu.

Jarman menambahkan, dari kajian tersebut, tim juga akan merekomendasikan berapa dana yang harus ditanggung masing-masing BUMN untuk perbaikan jalur kereta itu.

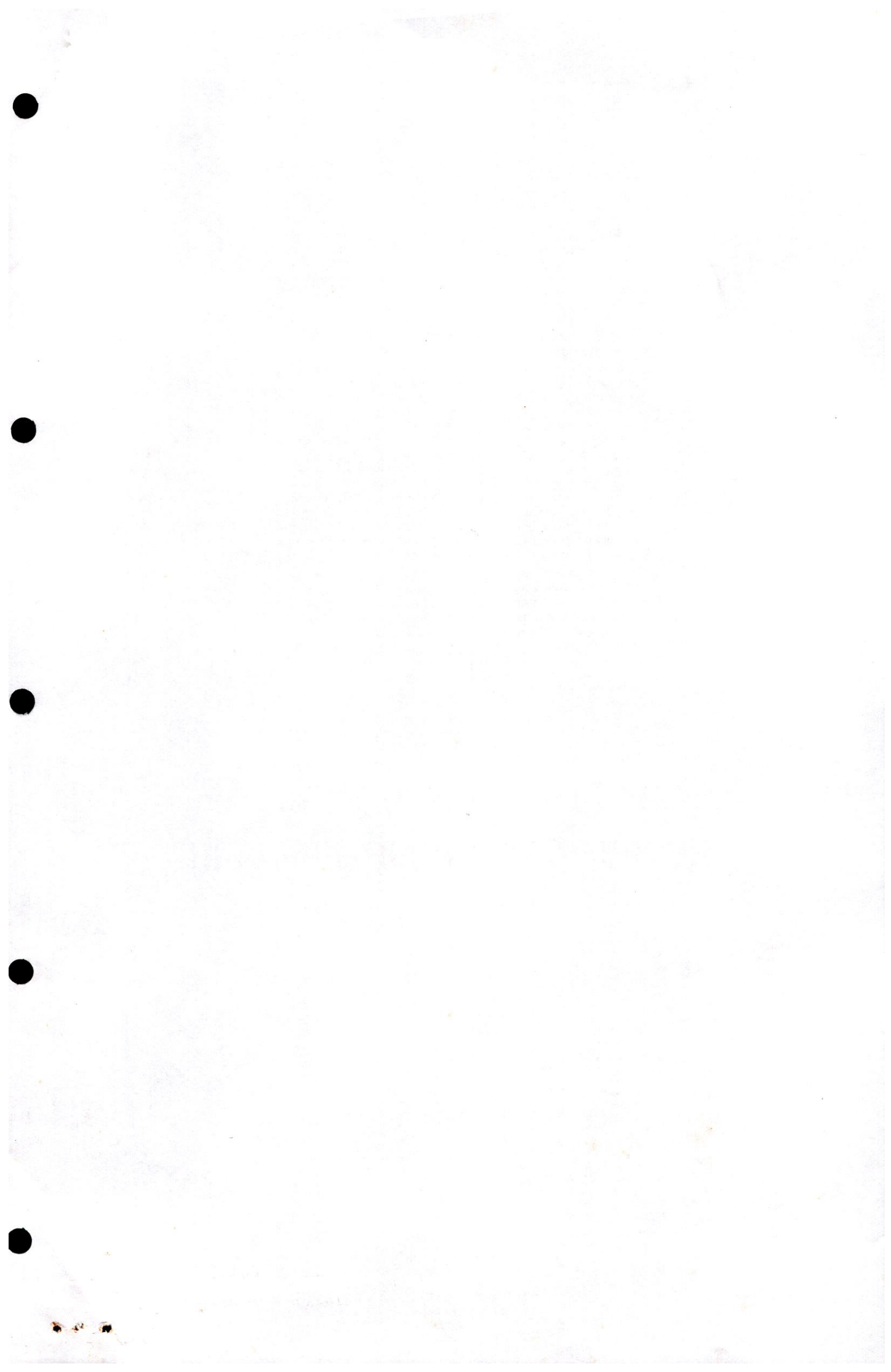
Seperti diketahui, sejak akhir tahun lalu pasokan batu bara dari Bukit Asam ke PLTU Suralaya mengalami hambatan sejak rusaknya jembatan rel kereta api di Martapura. Selain itu, selama ini kereta pengangkut batu bara itu juga kerap tergelincir dari rel-

nya. Akibatnya, Bukit Asam menurunkan pasokan batu bara ke Suralaya dari rata-rata sekitar 500-600 ribu ton per bulan menjadi hanya sekitar 400 ribu ton.

Akibatnya, Suralaya menurunkan kapasitas produksinya dari biasanya sekitar 3.600 megawatt. Meski begitu, manajemen Indonesia Power telah menyatakan komitmennya untuk tidak akan melakukan pemadaman listrik di daerah yang disuplainya, yaitu Jakarta, Bekasi, Bogor, dan Tangerang. Tujuh unit pembangkit listrik di PLTU itu juga dinyatakan masih tetap beroperasi.

Jarman mengatakan, tim ini nantinya akan memfokuskan perhatiannya pada perbaikan rel, dan bukan kepada lokomotif ataupun gerbong kereta. Ini karena kondisi kereta api yang dipakai saat ini masih cukup bagus. Selain itu, kata dia, rel kereta itu nantinya tetap hanya berupa satu jalur. Dimintai tanggapannya soal ini, Direktur Utama Bukit Asam Ismet Harmaini terlihat enggan berkomentar. "Kalau soal rel kereta api tanyakan ke PT KAI," ujar dia.

Mengenai pembiayaan perbaikan ini, sebuah investor Jepang dikabarkan telah melobi pemerintah Indonesia. Investor itu dikabarkan menyatakan kesiapannya untuk mencarikan dana pinjaman dari pemerintah Jepang untuk perbaikan ini. Sejauh ini, belum ada komitmen konkret dengan investor itu. ● budi



HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

<input checked="" type="checkbox"/> BISNIS INDONESIA <input type="checkbox"/> KOMPAS <input type="checkbox"/> KORAN TEMPO <input type="checkbox"/> MEDIA INDONESIA <input type="checkbox"/> NERACA <input type="checkbox"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="checkbox"/> RAKYAT MERDEKA <input type="checkbox"/> REPUBLIKA <input type="checkbox"/> SUARA KARYA		<input type="checkbox"/> SUARA PEMBARUAN <input type="checkbox"/> SINAR HARAPAN <input type="checkbox"/> THE JAKARTA POST <input type="checkbox"/> MAJALAH GATRA <input type="checkbox"/> MAJALAH TEMPO <input type="checkbox"/> MAJALAH FORUM <input type="checkbox"/> INVESTOR IND. <input type="checkbox"/>									
KODE : <input type="checkbox"/> LISTRIK <input type="checkbox"/> MIGAS		<input type="checkbox"/> GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL <input checked="" type="checkbox"/> UMUM									
JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16						17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31					
HALAMAN : B. 12											TAHUN 2004

PGN siap hadapi gugatan Walhi

JAKARTA (Bisnis): PT Perusahaan Gas Negara Tbk menyatakan siap untuk menghadapi gugatan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) yang disampaikan kepada Pengadilan Negeri Lampung.

Iwan Heryawan, Koordinator Proyek Transmisi dan Distribusi Gas PGN, mengatakan hingga kini PGN belum menerima pemberitahuan atas gugatan Walhi.

"Kami belum menerima pemberitahuan atas gugatan yang disampaikan Walhi tetapi kami berupaya untuk bertemu dengan Walhi untuk membicarakan persoalan tersebut," ujarnya kepada *Bisnis* kemarin.

Walhi pekan lalu menyatakan akan menggugat PGN melalui Pengadilan Negeri Lampung agar BUMN gas itu membatalkan pembangunan proyek pipanisasi dari Sumsel ke Jawa Barat.

Walhi menilai proyek pipanisasi gas tersebut tidak pernah disosialisasikan kepada masyarakat, padahal proyek itu sudah diprogramkan sejak 1986 sehingga masyarakat menuntut transparansi dari proyek itu.

Sejauh ini, Walhi melihat PGN hanya mengajukan dokumen analisis dampak lingkungan (amdal) dan izin dari gubernur yang keluar pada 16 Februari 2004.

Menanggapi isu Amdal ini, Iwan menegaskan PGN telah mendapatkan izin dari komisi amdal untuk yang kedua kali meskipun proyek belum berjalan. "Kalau amdal yang kami ajukan, kenapa komisi amdal merekomendasikan dan kini diperpanjang dua kali."

Menurutnya, perseroan memberikan batas hutan lindung dengan garis pipa agar lebih jelas. Namun jika masyarakat mempermasalahkannya hal itu, PGN akan mengajak lembaga swadaya masyarakat untuk meninjau lokasi secara langsung.

Sejauh ini, tambah Iwan, manajemen PGN yakin rencana pembangunan pipa gas itu sudah dilaksanakan sesuai dengan prosedur karena proyek ini bukanlah yang pertama kali dikerjakan perseroan.

Sebagai contoh, tuturnya, adalah pembangunan pipa di Kuala Tungkal Jambi dan Panaran di Batam yang melewati hutan lindung. Akibat

pembangunan pipa, PGN membuka hutan bakau tetapi perseroan menanam kembali hutan tersebut.

"Kami juga membikin kesepakatan dengan Pemda Batam untuk menjadikan hutan itu sebagai daerah konservasi," terangnya.

Obligasi samurai

Terkait rencana penerbitan obligasi samurai senilai US\$80 juta, Sumarno Suro, Komisaris PGN, mengatakan jajaran direksi PGN harus mencari pembiayaan eksternal yang murah dan tidak meminta jaminan dari pemerintah Indonesia untuk membiayai pembangunan jaringan pipa gas.

"Rencana penerbitan obligasi samurai masih dikaji direksi PGN dan belum disampaikan ke komisaris," ujarnya akhir pekan lalu.

Dewan komisaris, terang Suro, mengingatkan direksi PGN untuk mencari pembiayaan eksternal yang tidak memerlukan jaminan dari pemerintah.

Hal itu disebabkan PGN telah menjadi perusahaan publik sehingga harus dapat mencari pembiayaan tanpa melibatkan jaminan dari pemerintah meskipun PGN masih berstatus BUMN.

PGN dan Mizuho Bank menjajaki penerbitan obligasi samurai itu untuk membiayai pembangunan jaringan pipa gas dari Duri-Dumai-Medan sepanjang 400 kilometer. (wiw)

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH FORUM
- INVESTOR IND.
-

KODE : LISTRIK
 MIGAS

GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 UMUM

JAN FEB **MAR** APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 **29** 30 31
HALAMAN : 4 TAHUN 2004

Pemda Kaltim Gugat Menteri Soal Divestasi KPC

SAMARINDA (Media): Akibat berlarut-larutnya penyelesaian proses divestasi saham PT Kaltim Prima Coal (KPC), Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) akan menggugat sejumlah menteri Kabinet Gotong Royong melalui jalur hukum.

"Masalah ini sudah memasuki tahun keenam, namun proses pembelian saham KPC sebesar 51 persen tidak pernah tuntas. Hal ini membuat berbagai kalangan termasuk masyarakat mulai mempertanyakan keseriusan pemprov Kaltim dan DPRD I dalam divestasi tersebut," ungkap Gubernur Kaltim Suwarna AF kepada wartawan, pekan lalu.

Didampingi Sekretaris Pemprov Kaltim Syaiful Teteng, Suwarna mengatakan dari 51 persen saham KPC yang dijual, 20 persen di antaranya dialokasikan

untuk PT Bukit Asam dan 31 persen lainnya untuk Pemprov Kaltim. Tetapi, hingga saat ini pembagian tersebut tidak jelas penyelesaiannya, sampai saham PT KPC diakuisisi 100 persen oleh PT Bumi Resources Tbk (BUMI). Saham yang sudah dikuasai BUMI senilai US\$ 313 juta, setelah dipotong utang sebesar US\$187 juta dari total harga US\$ 500 juta yang diterima BP dan Rio Tinto.

Menurut Suwarna, pertanyaan masyarakat tentang keseriusan pemprov dan DPRD Kaltim mengenai proses divestasi saham KPC tersebut merupakan hal yang wajar. Apalagi batu bara dari bumi Kaltim terus ditambang.

Berkaitan dengan gugatan tersebut, menurut Syaiful Teteng, gugatan terhadap menteri Kabinet Gotong Royong itu akan di-

tujukan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Menteri Koordinator Perekonomian (Menko Perekonomian).

Dua menteri tersebut dianggap paling bertanggung jawab soal divestasi saham KPC itu.

"Menurut perjanjian kerja sama Perusahaan Pertambangan Batu Bara (P2B), masalah ini belum tuntas, sehingga kami harus bersikap dengan menyerahkan kasus ini ke jalur hukum," ujar Teteng.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Provinsi Kaltim Kasypul Anwar As'ad mengaku masalah divestasi saham KPC belum ada titik terang, namun Pemprov Kaltim tetap menuntut divestasi saham sebesar 51 persen bukan sisa dari hasil pembelian saham oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Timur (Kutim).

"Kalau Pemkab Kutim sudah membeli saham PT KPC 18,6 persen itu wajar-wajar saja, karena menjadi hak daerah itu. Tetapi, kami di tingkat provinsi tetap menuntut divestasi saham sebesar 51 persen bukan sisa dari 18,6 persen setelah pembelian dari Pemkab Kutim," jelas Kasypul. Di sisi lain bila pemerintah pusat berpendapat proses divestasi saham KPC tuntas setelah Pemkab Kutim membeli 18,6 persen saham KPC, hal itu tidak benar.

Melihat kondisi politik nasional dewasa ini Teteng berpendapat tidak ada tanda-tanda divestasi saham KPC akan tuntas tahun ini.

Pasalnya sebagai bagian dari pengambil keputusan dalam kasus divestasi saham KPC, keanggotaan DPR RI dalam waktu dekat akan terjadi perubahan.

(MX/E-6)